

KEMITRAAN UNI EROPA DAN INDONESIA

3 September 2019

Indonesia dan Uni Eropa telah lama menjalin hubungan yang baik, berdasarkan nilai-nilai yang sama seperti integrasi kawasan, demokrasi, perdagangan, hak asasi manusia dan komitmen untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hubungan ini mencerminkan pentingnya Indonesia bagi Uni Eropa, yakni sebagai anggota G20, demokrasi terbesar ketiga di dunia dan pengaruhnya dalam ASEAN. Indonesia merupakan negara pertama di kawasan ASEAN yang memiliki [Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama \(PCA\)](#) dengan Uni Eropa, yaitu perjanjian yang mengatur hubungan dan kerjasama secara menyeluruh.



Seiring dengan meningkatnya status Indonesia di panggung dunia, kemitraannya dengan Uni Eropa semakin kokoh. Uni Eropa dan Indonesia senantiasa memperdalam hubungan ini dengan fokus pada sejumlah bidang.



Prioritas Uni Eropa dalam hubungannya dengan Indonesia:

- Memperkuat keterkaitan ekonomi dan perdagangan dengan merampungkan Perjanjian Kemitraan Komprehensif antara Uni Eropa dengan Indonesia (CEPA);
- Kemitraan Uni Eropa dan Indonesia yang lebih kuat dalam mempromosikan keamanan, demokrasi dan hak asasi manusia, baik secara regional maupun global;
- Agenda Pembangunan Berkelanjutan, terutama lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama (PCA)

- PCA merupakan kerangka kerja secara menyeluruh untuk hubungan politik, hubungan ekonomi dan kerja sama antara Uni Eropa dan Indonesia. PCA mulai berlaku pada bulan Mei 2014.
- PCA ini merupakan yang pertama di kawasan ASEAN.
- PCA mencakup berbagai bidang seperti perdagangan, lingkungan hidup, energi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, migrasi dan anti-terrorisme, serta hubungan antar warga.
- Dengan adanya PCA, maka terdapat banyak dialog resmi untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang:
 - **Dialog Politik**
 - Kelompok kerja bidang **Perdagangan dan Investasi**
 - **Dialog Hak Asasi Manusia**
 - Kelompok kerja bidang **Kerja Sama Pembangunan**
 - **Dialog Keamanan**
 - **Dialog Tingkat Tinggi tentang Perikanan dan Kemaritiman**
 - Kelompok kerja bidang **Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim**

POLITIK, KEAMANAN DAN PETAHANAN

Uni Eropa dan Indonesia memiliki sejarah kerja sama yang panjang terutama dalam komitmen untuk perdamaian dan stabilitas. Contoh terbaik untuk hal ini adalah dikerahkannya **Misi Pemantau Aceh** (AMM) pada tahun 2005, di mana Uni Eropa memimpin operasi pemeliharaan perdamaian dan pengelolaan krisis di provinsi Aceh untuk memantau pelaksanaan perjanjian perdamaian Helsinki. Operasi ini sangat berhasil dan berakhir pada bulan Desember 2006.

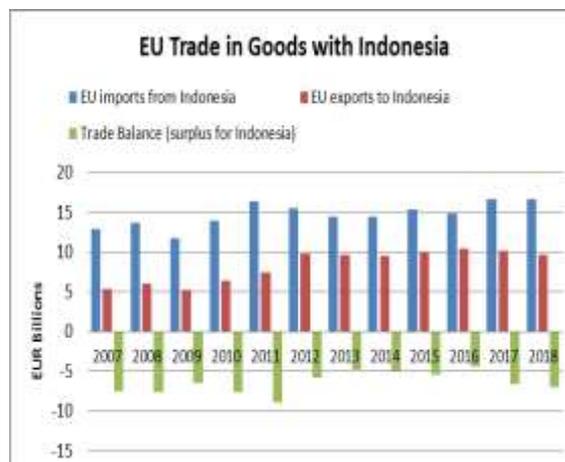
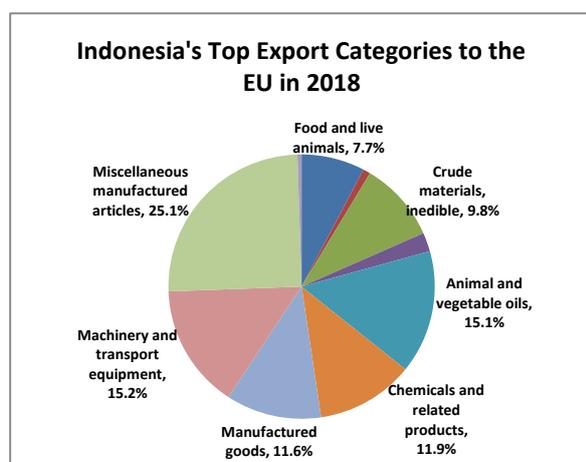


*Misi Pemantau Uni Eropa di Aceh
(15 September 2005)*

Dewasa ini, kerja sama lebih meluas, termasuk di **bidang pencegahan terorisme dan ekstremisme dengan kekerasan, pelatihan pemeliharaan perdamaian dan pendidikan pertahanan**, serta dalam upaya memerangi peredaran narkoba. Selain itu, kerja sama semakin meningkat pula antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan badan-badan khusus Indonesia dengan rekan-rekan mereka di Uni Eropa yang berkecimpung di bidang-bidang tersebut.

Indonesia dan Uni Eropa mendukung tatanan internasional berbasis aturan dan multilateralisme yang efektif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai intinya. Dalam berbagai isu global, Indonesia dan Uni Eropa memiliki visi yang sama serta menanggapi isu-isu tersebut dengan bekerja sama, misalnya dari non-proliferasi senjata pemusnah massal hingga proses perdamaian diberbagai belahan dunia.

PERDAGANGAN DAN INVESTASI

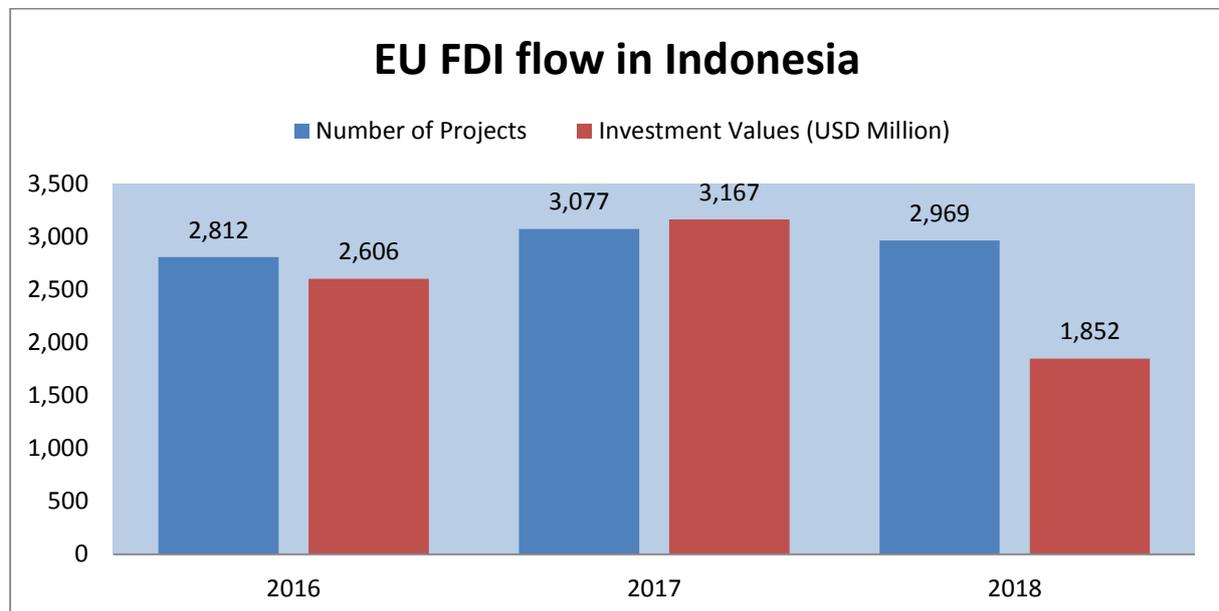


Sumber: Eurostat

Total perdagangan barang antara Uni Eropa dan Indonesia terus tumbuh dan telah mencapai **EUR 26,3 milyar pada tahun 2018**, dengan surplus substansial senilai EUR 6,9 milyar bagi pihak Indonesia. Uni Eropa merupakan tujuan ekspor dan sumber impor terbesar ketiga untuk Indonesia. Arus perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa saling melengkapi dan produk-produk dari Uni Eropa merupakan dukungan penting bagi pembangunan infrastruktur dan industri Indonesia.

Selama bertahun-tahun, Uni Eropa secara konsisten merupakan **investor non-Asia utama bagi Indonesia**, yakni dengan aliran Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) yang mencapai lebih dari USD 1,8 milyar pada tahun 2018. Nilai investasi langsung Uni Eropa yang masuk ke Indonesia terus meningkat dan mencapai EUR 33,1 milyar pada tahun 2017. Perusahaan-perusahaan Uni Eropa berinvestasi di sektor-sektor yang menghasilkan produk atau aktivitas bernilai tambah tinggi serta memberi lapangan kerja berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia. Ada sekitar 1.000 perusahaan

Eropa yang mempekerjakan ~1,1 juta orang Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini membawa teknologi canggih, sehingga membantu meningkatkan nilai tambah Indonesia dalam rantai nilai industri. Perusahaan-perusahaan tersebut juga sangat mementingkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan mendorong praktik bisnis berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan inklusif.



Sumber: BKPM

EU-INDONESIA CEPA

Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Uni Eropa dan Indonesia **resmi dimulai pada tanggal 18 Juli 2016** dan negosiasi putaran ke-delapan telah berlangsung pada bulan Juni 2019. Pihak Indonesia menyatakan niat untuk merampungkan perundingan di bawah pemerintahan Presiden saat ini. Uni Eropa tidak memiliki tenggat waktu karena mementingkan konten daripada batasan waktu.

Berdasarkan estimasi Uni Eropa, CEPA memiliki potensi untuk meningkatkan nilai pertumbuhan PDB Indonesia yaitu sebesar hampir 0,5% dan volume tahunan ekspor Indonesia akan tumbuh sebesar 5,4% atau meningkat sebesar USD 1,1 milyar. Hal ini sangat penting untuk mencapai sasaran pertumbuhan sebesar 7% hingga 8% dari PDB per tahun. Negara-negara lain yang merupakan kompetitor langsung bagi Indonesia – termasuk Vietnam, Filipina dan Malaysia – kini telah berada pada tahap merampungkan perundingan perdagangan dengan Uni Eropa atau tengah menjalani putaran-putaran perundingan. Kepastian dalam aturan perdagangan yang disepakati bersama dan pasar yang terdiri dari 510 juta konsumen Eropa dengan daya beli sangat tinggi dapat memberikan Indonesia suatu perlindungan yang dibutuhkan terutama mengingat adanya dampak dari perang dagang yang tengah terjadi di dunia ini.



EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)



KERJA SAMA EKONOMI DAN INTEGRASI KAWASAN

Uni Eropa adalah mitra dialog lama dan penting bagi ASEAN, yang mampu berbagi pengalaman tentang integrasi kawasan untuk setiap pilar dari ketiga Komunitas ASEAN. Bantuan untuk pembentukan pasar tunggal ASEAN disalurkan di tingkat regional dan bersifat melengkapi pengembangan kapasitas perdagangan bilateral untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memperoleh manfaat dari peluang-peluang ekspor.

Program ARISE Plus Indonesia senilai EUR 15 juta telah dimulai pada tahun 2019, dengan tujuan mendukung daya saing dan integrasi Indonesia dalam rantai nilai global. Program ini terkait erat dengan program regional ARISE Plus (EUR 41 juta) yang mendukung integrasi ekonomi regional dan agenda perdagangan ASEAN.

Uni Eropa bekerja sama secara erat pula dengan negara-negara anggota Uni Eropa dalam pemberian hibah yang menyertai pinjaman dari bank-bank pembangunan Eropa.

BANTUAN KEMANUSIAAN

Uni Eropa bekerja erat dalam kerangka solidaritas dengan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan di saat krisis. Uni Eropa menyalurkan **EUR 1,5 juta dana kemanusiaan darurat untuk upaya bantuan gempa bumi Sulawesi**. Uni Eropa juga memberikan layanan pemetaan dari satelit Copernicus dan telah mengaktifasi Mekanisme Perlindungan Sipil Uni Eropa, menyalurkan bantuan

dari Negara-negara Anggota Uni Eropa, memobilisasi para ahli bantuan kemanusiaan dan berkontribusi dalam pembiayaan upaya-upaya Negara-negara Anggota Uni Eropa. Secara kolektif, **bantuan total Uni Eropa untuk Sulawesi** mencapai lebih dari **EUR 18 juta**. Pada tahun 2018, Uni Eropa menyalurkan **EUR 650,000 sebagai tanggap darurat untuk Lombok** setelah terjadinya gempa bulan Agustus. Antara bulan Desember 2018 dan Februari 2019, Uni Eropa menyalurkan **EUR 380,000 dana kemanusiaan** untuk membantu masyarakat yang terkena dampak **tsunami Selat Sunda**.

PENDIDIKAN

Dalam hal kemitraan Uni Eropa dengan Indonesia di bidang **pendidikan tinggi**, program **beasiswa Erasmus+** yang bergengsi (lebih dari 200 beasiswa per tahun) sangat populer di kalangan mahasiswa Indonesia. Beasiswa ini tidak saja mendanai studi di Eropa, namun turut membina generasi muda agar dapat menghargai keanekaragaman, serta meningkatkan keingintahuan dan persahabatan. Upaya-upaya ini telah membantu mendorong pertukaran gagasan dan pengetahuan, serta mempromosikan kontak antar warga Indonesia dan Eropa.

Di masa lampau, **Uni Eropa merupakan salah satu mitra terbesar yang mendukung pendidikan di Indonesia**. Dari tahun 2008 hingga 2017, Uni Eropa telah memberikan dukungan anggaran langsung kepada pemerintahan Indonesia dengan total hibah melebihi **IDR 5,7 triliun** untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hibah ini secara langsung bermanfaat bagi lebih dari 7 juta anak di lebih dari 55.000 sekolah.



KESEHATAN

Uni Eropa dan Indonesia memiliki sejarah bekerja sama secara erat di bidang kesehatan masyarakat. Khususnya, Uni Eropa memberikan kontribusi yang signifikan kepada Pemerintah Indonesia dan mitra masyarakat sipil melalui **Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (GFATM)**, yakni lebih dari 44% dari total anggaran GFATM. Bantuan untuk [Indonesia](#) melalui GFATM di tahun 2017 mencakup perawatan bagi 430,000 penderita tuberkulosis, pendistribusian 2,350,000 kelambu nyamuk dan pemberian terapi retroviral HIV/AIDS bagi 91,400 penderita.

Selain itu, Uni Eropa merupakan donor utama dalam upaya Indonesia mengendalikan **influenza**, khususnya dibawah Strategi Nasional Pengendalian Avian Influenza (Flu Burung) dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi.

TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Uni Eropa mendukung prioritas pemerintah Indonesia tentang **tata pemerintahan yang baik**, **perang melawan korupsi**, **perbaikan peradilan dan penegak hukum**, penghargaan yang lebih tinggi terhadap **hak asasi manusia** dan perang melawan **kejahatan** lintas negara.



Beberapa tahun lampau, Uni Eropa telah memberikan dukungan kepada tujuh pemerintah daerah dalam memperbaiki **efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa publik**. Uni Eropa juga telah mendukung **peningkatan kapasitas** Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Pusat Pelatihan Penegakkan Hukum (JCLEC).

MASYARAKAT SIPIL

Uni Eropa memiliki sejarah panjang dalam bekerja sama dengan **organisasi masyarakat sipil (CSOs)** di Indonesia dalam berbagai bidang seperti pembangunan ekonomi daerah, produksi dan konsumsi berkelanjutan, serta penghargaan atas kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Dari tahun 2007 hingga 2019, Uni Eropa telah menghibahkan **EUR 49 juta** kepada CSOs di Indonesia untuk pelaksanaan **97 proyek** di **31 provinsi**.



Pendanaan Uni Eropa untuk CSOs di Indonesia (2007-2019)

Meskipun Indonesia tidak lagi menerima bantuan pembangunan secara bilateral dari Uni Eropa karena status Indonesia sebagai negara G20, Uni Eropa tetap melanjutkan bantuannya melalui program tematik untuk menciptakan **lingkungan yang mendukung bagi CSOs** di Indonesia. Untuk tujuan ini, dana sebesar **EUR 11 juta** telah dialokasikan untuk periode 2018-2020.

HAK ASASI MANUSIA

Uni Eropa terus menjalin hubungan yang konstruktif dengan Indonesia dalam berbagai masalah hak asasi manusia. Sejauh ini, Uni Eropa dan Indonesia telah mengadakan tujuh pertemuan **Dialog Hak Asasi Manusia**. Uni Eropa telah memberikan dukungan khusus untuk memajukan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Indonesia melalui [Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia](#) (EIDHR). Sebanyak **42 proyek** mendapat dukungan dengan nilai total **EUR 12,3 juta** dan memiliki fokus yang beragam: pendidikan kewarganegaraan, pemantauan pemilu, hak kelompok-kelompok rentan, pertanggung-jawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia, pencegahan penyiksaan, bisnis dan hak asasi manusia, serta sosialisasi toleransi antar agama dan kebebasan berekspresi.

LINGKUNGAN HIDUP DAN PERUBAHAN IKLIM

Melindungi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim global merupakan isu sentral dalam kerja sama Uni Eropa dengan Indonesia; dan Uni Eropa adalah salah satu penggerak utama untuk prakarsa-prakarsa terkait, terutama dalam hal kualitas udara/ air, efisiensi sumber daya, limbah, keanekaragaman hayati dan pengelolaan berkelanjutan hutan hujan Indonesia.

Saat konferensi iklim (COP21) di Paris pada tahun 2015, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GHG) sebesar 29% hingga 41% pada tahun 2030 dibanding scenario “business as usual”. Secara khusus, sektor kehutanan diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian sasaran ini.

Uni Eropa juga mendukung prioritas Indonesia lainnya di bidang lingkungan hidup. Misalnya, **dukungan bagi perencanaan pembangunan rendah emisi di Aceh, pemulihan lahan gambut,** maupun **informasi yang lebih baik untuk penggunaan lahan dan sumber daya laut.**

Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT)

Pada tahun 2013, Uni Eropa dan Indonesia menandatangani Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) untuk meningkatkan tata kelola hutan dan mempromosikan perdagangan kayu legal dari Indonesia ke Uni Eropa. Indonesia dengan dukungan masyarakat sipil, memprakasai dan mengembangkan sistem yang memberikan akses kayu ke pasar Eropa.



- FLEGT merupakan rencana aksi Uni Eropa untuk mengatasi pembalakan liar
- FLEGT telah membantu Indonesia mengembangkan salah satu Sistem Jaminan Legalitas Kayu paling canggih di dunia (SLVK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)
- Indonesia kemudian menjadi negara pertama yang dapat menerbitkan sendiri lisensi FLEGT
- **Pangsa ekspor kayu tropis Indonesia ke Uni Eropa meningkat secara drastis menjadi 12% dalam 10 tahun terakhir.**

Uni Eropa juga meningkatkan upayanya untuk mensosialisasikan **energi terbarukan, efisiensi energi, serta "Ekonomi Sirkular"**. Termasuk hal ini adalah upaya pengumpulan, pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang limbah padat, hal mana merupakan salah satu cara untuk mencegah sampah laut dan dampak terhadap sektor pariwisata – suatu sektor yang menguntungkan bagi Indonesia. Mempertahankan nilai produk dan bahan selama mungkin dikombinasikan dengan penggunaan kembali pada akhir siklus hidup produk akan membantu meminimalkan limbah dan penggunaan sumber daya serta dapat membawa manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia, berkontribusi pada inovasi, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, keberlanjutan jangka panjang dan daya saing.
